

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suku Batak Toba merupakan salah satu suku besar di Indonesia. Suku Batak Toba berdiam di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, dan Kabupaten Samosir. Masyarakat tradisional Batak Toba merupakan masyarakat genealogis patrilineal, artinya keturunannya berasal dari pihak laki-laki atau ayah. Silsilah atau marga merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Batak. Dalam tradisi Batak dikenal dengan istilah Dalihan Na Tolu (tiga tungku). "Dalihan Na Tolu" terdiri dari tiga unsur Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu dan Elek Marboru. Hal ini sudah menjadi hal yang tidak dapat dipungkiri dalam budaya masyarakat Batak, dimana perempuan ditempatkan di posisi kedua dan laki-laki dijadikan raja.

Pada masyarakat Batak Toba, sistem gender yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan hanya mencakup dua yaitu maskulinitas dan feminitas. Laki-laki memainkan peran penting dalam lingkungan sosial dan tatanan kemasyarakatan, laki-laki banyak memegang posisi penting seperti menjadi ketua umum dalam perkumpulan marga, menjadi penasihat adat dan menjadi dewan penatua. Marga menggambarkan garis keturunan dalam keluarga dan telah menjadi ciri khas suku Batak Toba sejak awal. Marga merupakan identitas krusial bagi masyarakat Batak Toba dan memungkinkan mereka memahami

ikatan kekerabatan yang menghubungkan mereka. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya budaya patriarki pada suku Batak Toba.¹

Dalam mitologi Batak Toba terungkap bahwa laki-laki adalah penguasa atas perempuan terbukti dengan sistem adat istiadat yang membingkai kehidupan sosial dimana kekuasaan berada ditangan laki-laki. Zaman telah berubah baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, politik dan masyarakat, namun dalam realitas kehidupan sosial kaitannya dengan Patriarki sangat kuat. Perempuan dipandang sebagai pemimpin dalam sektor domestik dan laki-laki sebagai pemilik ruang publik.²

Pengaruh budaya Batak Toba yang patriarki mengabaikan perempuan. Mengutamakan laki-laki sedangkan perempuan hanya sebagai pendukung dalam suatu acara adat di Batak Toba.³ Sebab laki-laki membawa identitas bagi suku Batak Toba. Akibatnya, laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan perempuan sehingga mengakibatkan hilangnya marga dari perempuan yang pada akhirnya menjadi generasi penerus laki-laki yang menggantikan marga suami dan anak.⁴

¹ Verena Patrin, *Hubungan Persepsi Pola Asuh Otoriter Dengan Peran Gender Pada Perempuan Suku Batak* Universitas Pendidikan Indonesia, 2023. Hlm, 4.

sosial dimana kekuasaan berada ditangan laki-laki. Zaman telah berubah baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, politik dan masyarakat, namun dalam realitas kehidupan sosial kaitannya dengan Patriarki sangat kuat. Perempuan dipandang sebagai pemimpin dalam sektor domestik dan laki-laki sebagai pemilik ruang publik.⁵

Pengaruh budaya Batak Toba yang patriarki mengabaikan perempuan. Mengutamakan laki-laki sedangkan perempuan hanya sebagai pendukung dalam suatu acara adat di Batak Toba.⁶ Sebab laki-laki membawa identitas bagi suku Batak Toba. Akibatnya, laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan perempuan sehingga mengakibatkan hilangnya marga dari perempuan yang pada akhirnya menjadi generasi penerus laki-laki yang menggantikan marga suami dan anak.⁷

Memahami bahwa kepemimpinan identik dengan laki-laki, karena dianggap kuat, berani, tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Ketika perempuan menjadi pemimpin, mereka dianggap aneh dan menyimpang dari sistem sosial. Hal ini sejalan dengan pernyataan Amelia Fauzi bahwa: “Secara konseptual, ketidakadilan gender merupakan cerminan dari definisi dan kristalisasi peran gender dalam pembagian kerja secara seksual dan dalam

asumsi ideologi patriarki.” Dengan kuatnya ideologi gender yang patriarki, laki-laki dan perempuan tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan peran sosial dan hukum mereka sendiri.⁸ Menurut Pasal, 27 UUD 1945, perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan laki-laki, dibidang hukum dan pemerintahan.

Demokrasi di Indonesia saat ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memasuki dunia politik melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah penetapan tingkat partisipasi perempuan sebesar 30% dalam pemilihan umum (Pemilu) yang bertujuan untuk mencegah dominasi laki-laki di lembaga politik dalam perumusan aturan opini publik.⁹ Anggota legislatif perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam mewakili aspirasi perempuan yang masih terabaikan.

Humbang Hasundutan yang disingkat dengan nama Humbahas, adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk pada 28 Juli 2003. Secara topografi, wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki sifat tanah bergelombang dan berbukit dengan ketinggian antara 330 – 2075 meter diatas permukaan laut. Mayoritas penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan suku Batak Toba¹⁰. Sementara, sebagian kecil merupakan suku terdekat Batak Toba, yakni Batak Simalungun, Batak Karo,

⁸ Amelia, F, (2004). *Realita dan cita kesetaraan gender di UIN Jakarta*. Jakarta: Mc Gill IAIN

⁹ Jusri Adi, Fitriani Sari Handayani Razak, Hendri Kurniawan, *Persepsi Masyarakat Terhadap Perempuan di Ranah Politik Lokal Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 8 No. 1 April 2022.Hal. 123.

¹⁰ Martin Simanjuntak dkk, *Dari Humbang Hasundutan untuk Indonesia* (Jakarta: Perpus

Batak Angkola, dan Batak Pakpak. Batak Toba yang merupakan suku asli dan dominan di Kabupaten Humbahas, mempengaruhi pada bahasa komunikasi yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahasa Batak Toba menjadi bahasa utama yang digunakan oleh penduduk Humbahas selain bahasa Indonesia¹¹. Data menunjukkan persebaran marga batak di Kabupaten Humbang Hasundutan cukup banyak diantaranya Batak Toba tersebar sebanyak 186 marga, Batak Simalungun tersebar sebanyak 60 marga, Batak PakPak tersebar sebanyak 58 marga, Batak Mandailing tersebar sebanyak 30 marga, dan Batak Karo tersebar sebanyak 91 marga. Sehingga secara demografi mayoritas penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan adalah suku Batak Toba¹².

Hal ini memiliki signifikansi sosial dan budaya yang tinggi karena mengkaji persepsi masyarakat lokal terhadap partisipasi politik perempuan dalam konteks budaya dan tradisi Batak Toba. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki konteks politik atau sosial seputar partisipasi politik perempuan yang akan memberikan wawasan yang berharga mengenai dinamika politik lokal dan dampaknya terhadap persepsi masyarakat terhadap partisipasi politik perempuan. Selain itu, tersedianya data yang cukup dan sesuai dapat memudahkan pengumpulan data yang diperlukan.

Pada Pemilu di Kabupaten Humbang Hasundutan terdapat tiga daerah pemilihan yang masing-masing terdiri dari 30% partisipasi perempuan. Satu atau dua perempuan terwakili di masing-masing dari tiga DAPIL perempuan yang dipilih. Ambang batas 30% perempuan di setiap pemilu terlampaui. Terlihat

¹¹ *Ibid.*, hlm. 102

¹² *Wikipedia*

kesadaran politik perempuan meningkat dan mampu bersaing di dunia politik (DPRD).

Jumlah calon anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan pada setiap partai peserta pemilu 2019 rata-rata mencapai lebih dari 30% dari seluruh calon anggota parlemen yang diajukan. Kesadaran mengenai partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif harus ditingkatkan dibarengi dengan antusiasme masyarakat untuk memilih. Kami berharap masyarakat akan memandang positif kehadiran calon perempuan sebagai anggota pemerintahan.

Secara kuantitatif peran politik perempuan di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan masih rendah. Pada Pemilu 2024, jumlah anggota DPRD perempuan hanya 5 dari 30 anggota DPRD. Peran perempuan sebagai anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam proses pengambilan keputusan politik cukup baik namun belum maksimal karena jumlah mereka yang masih sedikit menyebabkan laki-laki menempati posisi dominan dalam proses pengambilan keputusan. Studi ini mencoba menunjukkan faktor-faktor apa saja yang mendominasi partisipasi politik perempuan pada saat memberikan hak suaranya yaitu sebanyak 25 kursi.

Tabel 1.1
Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam
Tiga Periode Terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi Dalam Periode		
	2014-2019	2019-2024	2024-2029
PKB	2	0	1
GERINDRA	5	2	3
PDI-P	3	7	2
Golkar	6	5	9
NasDem	3	3	4
Perindo		(Baru) 2	3
PSI		(Baru) 1	1
PAN	1	0	1
Hanura	3	4	5
Demokrat	2	1	1
Jumlah Anggota	25	25	30
Jumlah Partai	8	8	10

Sumber: Wikipedia

Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri merupakan daerah otonom yang tingkat partisipasi pemilih perempuan masih rendah. Hal ini kita lihat pada pemilu yang baru diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2024. Berdasarkan data KPU Kabupaten Humbang Hasundutan, jumlah masyarakat wajib pilih di mencapai kurang lebih 141.453 orang. Jumlah perempuan 71.659 orang dan jumlah laki- laki 69.789 orang. Jumlah DPT dari perempuan lebih banyak dari laki-laki. Selisih jumlah DPT antara perempuan dengan laki-laki yaitu 1.870, artinya partisipasi politik perempuan sangat penting

dalam proses pemilihan dan keterlibatan perempuan di lembaga legislatif untuk mewakili kepentingan perempuan menjadi hal yang penting.

Perkembangan kesadaran perempuan untuk berpartisipasi sebagai anggota legislatif seharusnya dibarengi dengan antusiasme masyarakat untuk memilih calon legislatif perempuan. Masyarakat diharapkan memiliki persepsi yang baik terhadap kehadiran perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota pemerintahan atau legislatif. Parpol memiliki tanggung jawab untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen secara serius untuk mendapatkan bakal caleg perempuan yang memiliki kompetensi dan berkualitas.

Undang-Undang telah mengatur syarat parpol menjadi peserta pemilu salah satunya adalah menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat. Selain itu diatur pula, dalam daftar bakal calon anggota legislatif juga minimal memuat 30 persen perempuan, baik untuk DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Tabel 1.2
Nama Anggota DPRD Perempuan Kabupaten Humbang Hasundutan
Periode 2024-2029.

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	JABATAN	JUMLAH SUARA SAH
1.	Rosmintayani Simamora	Golkar	Humbang Hasundutan 2	Anggota	2.257
2.	Martini Purba	Hanura	Humbang Hasundutan 2	Anggota	1.179
3.	Ratna Marbun	Golkar	Humbang Hasundutan 3	Anggota	2.693
4.	Jessika Simamora.	Hanura	Humbang Hasundutan 4	Anggota	2.330
5	Normauli Simarmata	NasDem	Humbang Hasundutan 5	Anggota	2.023

Sumber: Data KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024.

Tabel 1.3
Anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan

Periode	Perempuan	Laki-Laki	Jumlah Kursi
2009-2014	2 Anggota	23 Anggota	25 Kursi
2014-2019	2 Anggota	23 Anggota	25 Kursi
2019-2024	4 Anggota	21 Anggota	25 Kursi
2024-2029	5 Anggota	25 Anggota	30 Kursi

Sumber: Data KPU Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024

Dilihat dari tabel di atas, perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan tergolong rendah yakni pada periode 2009-2014 dan 2014-2019 hanya mampu mencapai 8%. Pada periode 2019-2024 dan periode 2024-2029 sedikit meningkat yaitu 16% dari minimum target 30% perwakilan perempuan di parlemen Sementara 84% didominasi oleh laki-laki. Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada pemilu 2024 yang lolos menjadi calon anggota DPRD tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu sebanyak 62 orang dari 10 partai politik.¹³ Dari data tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan belum mencapai ketentuan karena hanya mampu mencapai persentase 16%, tentunya hal ini disebabkan oleh banyak faktor.

Penulis mencoba mengelompokkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, digunakan sebagai acuan untuk penulisan skripsi.

Terdapat beberapa referensi penulis yang relevan dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Betty Karya tentang “Persepsi

¹³ *Kpu.go.id*

Masyarakat tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kecamatan Parenggean.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap caleg perempuan yang mencalon sebagai anggota legislatif yaitu masih ada keraguan terhadap kemampuan menjadi wakil rakyat di DPRD nantinya, kurangnya sosialisasi dari caleg perempuan terhadap masyarakat sehingga menimbulkan persepsi masyarakat kurang menimbulkan pengaruh dan kurang dikenal oleh calon pemilih.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maya Sari dengan judul” Persepsi Masyarakat terhadap Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Baru Bandar Lampung Tahun 2015.” Metode penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan adanya keinginan dan dukungan masyarakat kepada perempuan-perempuan untuk berpartisipasi dalam politik khususnya keanggotaan legislatif.

Perbandingan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini terdapat pada hasil penelitian bahwa masih rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dan tingkat ketertarikan perempuan pada parlemen di Indonesia, khususnya Kabupaten

¹⁴ Betty Karya, Persepsi Masyarakat tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan Legislatif di Kecamatan Parenggean. Jurnal Sociopolitico, Vol. 3 No.2, Agustus 2021, Hal. 120-126.

Humbang Hasundutan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “***Persepsi Masyarakat suku Batak Toba terhadap Partisipasi Politik Perempuan (Studi: Di Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilu 2024).***”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan , maka pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Bagaimana persepsi Masyarakat suku batak toba terhadap partisipasi politik Perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada pemilu 2024?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui persepsi Masyarakat suku batak toba terhadap partisipasi politik Perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada pemilu 2024.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini berguna secara teoritis untuk mengembangkan konsep Ilmu Politik dengan dimensi kajian politik dan kenegaraan dalam hal pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik perempuan di keanggotaan legislatif.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan juga penelitian ini diharapkan dapat digunakan

menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada partisipasi politik perempuan, khususnya dalam pemilihan legislatif Kabupaten Humbang Hasundutan pada pemilu 2024 dan selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak yang terkait dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada pemilu berikutnya, dan bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian pada permasalahan yang sama. Referensi berharga bagi peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik pada politik, demokrasi lokal, dan pemilihan calon Lembaga legislatif khususnya perempuan.

1.5. LANDASAN TEORI

Teori adalah alat atau paradigma analisis yang digunakan untuk menggali permasalahan yang diangkat dalam tabel penelitian, dan landasan teori digunakan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Landasan teori dan konsep penulisan ini antara lain:

1.5.1 Partisipasi Politik

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Selanjutnya, Huntington dan Nelson pun menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam

bentuk seperti berpartisipasi dalam pemungutan suara, menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pimpinan politik untuk mempengaruhi kepentingan mereka yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang disebut *lobbying*, berperan sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, mencari koneksi untuk para pejabat pemerintah dan biasanya bermanfaat hanya bagi satu orang atau sekelompok orang.¹⁵

Huntington dan Nelson kemudian membagi landasan atau asal usul seseorang atau kelompok melakukan kegiatan partisipasi politik (terkecuali dalam bentuk mencari koneksi), yaitu:

- a. Kelas: individu-individu dengan status sosial, pendapatan dan pekerjaan yang sama.
- b. Kelompok: individu-individu dengan ras, agama, bahasa atau etnisitas yang sama.
- c. Lingkungan: individu-individu yang tempat tinggalnya sama atau berdekatan.
- d. Partai: individu-individu yang tergabung dalam organisasi formal yang sama dan berusaha untuk mempertahankan kontrol atas bidang eksekutif dan legislatif pemerintah.
- e. Golongan: individu-individu dengan status, pendidikan dan ekonomi yang tidak sederajat namun dipersatukan oleh interaksi secara terus menerus dan membentuk hubungan *patron client*.

¹⁵ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, "*Partisipasi Politik di Negara Berkembang*" hlm. 4.

Sementara itu Milbrath dan Goel membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori :

- 1) Apatis, adalah orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik.
- 2) Spektator, adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu.
- 3) Gladiator, adalah mereka yang aktif terlibat dalam proses politik misalnya komunikator, aktivis partai dan aktivis masyarakat.
- 4) Pengkritik, adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.¹⁶

Lain halnya dengan Frank Lindenfeld yang mengatakan bahwa kepuasan finansial adalah faktor utama seseorang berpartisipasi politik. Dalam studinya, Lindenfeld menemukan bahwa status ekonomi yang rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik dan orang yang bersangkutan pun akan menjadi apatis. Hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kemapanan ekonomi.

Tingkat partisipasi politik di setiap negara atau daerah bervariasi sejalan dengan tingkat pembangunan ekonominya. Dalam masyarakat yang kompleks dan lebih kaya, dengan tingkat industrialisasi dan urbanisasi serta sosial dan ekonomi yang lebih tinggi, lebih banyak orang yang terlibat dalam politik dibandingkan dengan masyarakat yang kurang berkembang dan primitif. Tingkat partisipasi politik juga ditentukan oleh kesadaran politik setiap anggota masyarakat.

¹⁶ H.A Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 289

Semakin sadar bahwa dirinya diperintah maka ia akan semakin menuntut untuk diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebaliknya, seseorang tidak menaruh perhatian pada politik disebabkan oleh kesadarannya bahwa pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pemimpin negara kurang memberi apresiasi terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan lebih fokus kepada salah satu kelompok yang membawa keuntungan bagi kepentingan mereka.

Galen A. Irwan dalam tulisannya mengenai *“Political Efficacy, Satisfaction and Participation”* menyimpulkan bahwa dalam beberapa keadaan tertentu, perasaan puas menentukan tingkat partisipasi.¹⁷ Kesimpulan Galen ini dapat berlangsung dalam suatu masyarakat karena pada dasarnya setiap individu yang terlibat dalam politik menaruh harapan bahwa kebutuhan dan aspirasinya akan diperhatikan oleh para pemimpin dan perbuatan mereka akan mempengaruhi pembuatan kebijakan demi kebaikan bersama.

1.5.2. Politik dan Gender

Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentuk budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan, gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman.¹⁸

Teori nurture menggambarkan adanya perbedaan perempuan dan

¹⁷ Miriam Budiardjo, *“Partisipasi dan Partai Politik”* hlm. 5.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Keadilan Kesetaraan Gender :Perspektif Islam, (Jakarta :Lembaga Kajian Agama Dan Gender:2001).* h Viii

Teori nurture menggambarkan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki yang pada hakikatnya adalah hasil dari konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar "kesamaan" yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*).¹⁹

Teori *Equilibrium*, disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/kuota) dan tidak bersifat universal. Kesetaraan gender dapat terjadi dengan memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasi atau keadaan. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan harus bekerjasama karena dalam teori ini ditekankan keharmonisan dalam hubungan laki-laki

dan Perempuan.²⁰

1.5.3. Teori Budaya Politik

Budaya Politik tentunya tidak terlepas dari kebudayaan dan politik. Kebudayaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak terbatas terhadap hal yang kasat mata seperti norma tentang manusia, yang menyangkut hal yang abstrak. Secara lebih luas arti dari budaya merupakan keseluruhan pengetahuan manusia yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami lingkungan yang dihadapi serta untuk mendorong tindakan yang diperlukan.

Negara tidak lepas dari hal-hal tentang kekuasaan, struktur pemerintahan dan hal yang berkaitan dengan hal tersebut tentu berkaitan dengan politik. Politik merupakan suatu bidang khusus tentang studi bagaimana cara manusia memecahkan permasalahan bersama dengan manusia lain, studi politik memiliki titik sentral yakni kekuasaan dalam konteks masyarakat.

Dari penjelasan tersebut dapat diartikan atau ditarik kesimpulan bahwa Budaya politik merupakan pandangan dan tindakan masyarakat terhadap proses kegiatan politik yang bersangkutan dengan pemerintahan. Budaya Politik suatu masyarakat ditentukan berdasarkan keadaan Sosial, Budaya, ekonomi dan Kondisi Geografis suatu masyarakat. Menurut ahli Almond dan Sidney Verba tipe Budaya Politik dibagi

menjadi tiga antara lain:

a. Budaya Politik Parokial

Almond dan Sidney Verba menyatakan Budaya Politik Parokial adalah spesialisasi peranan politik atau tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya Politik Parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan akan perubahan dari sistem politik. Pada Budaya Politik ini masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek politik yang luas. Budaya Politik Parokial kurang lebih bersifat murni karena fenomena didalamnya bersifat umum yang dimana bisa ditemukan di dalam masyarakat yang belum berkembang.

b. Budaya Politik Subjek/Kaula

Budaya Politik Subjek/kaula memiliki orientasi yang cukup tinggi terhadap sistem politik. Namun masukan, perhatian dan intensitas orientasi politik mereka terhadap masukan dan partisipasinya sangat rendah. Orientasi subjek politik menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem dan kebijakan. Demokrasi sulit berkembang dalam Budaya Politik Subjek/Kaula. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi politik yang rendah, sehingga sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi.

c. Budaya Politik Partisipan

Budaya Politik partisipan merupakan Budaya Politik yang orientasinya sangat eksplisit yang ditujukan kepada sistem secara keseluruhan. Masyarakat menggunakan dan merealisasikan hak politik.

Kemudian masyarakat akan menyadari hak dan kewajiban serta menggunakan secara aktif. Sehingga mereka dapat menilai dengan penuh kesadaran baik terhadap sistem atau peran dirinya sendiri.

Bentuk dari budaya politik masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya. Budaya politik Batak Toba memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh adat istiadat, struktur sosial, dan nilai-nilai tradisional yang kuat. Berikut adalah beberapa aspek utama dari budaya politik suku Batak Toba:

1. Sistem Kekerabatan dan Marga

Marga (Klan) dalam masyarakat Batak Toba, marga atau klan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan politik. Setiap individu diidentifikasi berdasarkan marganya, yang diwariskan melalui garis patrilineal. Marga ini menentukan jaringan sosial dan dukungan politik. Prinsip Dalihan Na Tolu adalah dasar dari struktur sosial Batak Toba, terdiri dari tiga elemen hula-hula (keluarga dari pihak ibu), dongan tubu (saudara sekandung), dan boru (keluarga dari pihak anak perempuan). Dalihan Na Tolu mengatur interaksi sosial dan politik, serta menjaga keseimbangan dan harmoni dalam komunitas.

2. Kepemimpinan Tradisional

Raja Adat atau kepemimpinan dalam masyarakat Batak Toba sering kali berada di tangan raja adat, yang biasanya dipilih dari kalangan pria.

Raja adat memiliki otoritas dalam urusan adat dan sering kali juga memiliki pengaruh dalam politik lokal. Musyawarah dan Konsensus merupakan Keputusan dalam masyarakat Batak Toba biasanya diambil melalui proses musyawarah dan konsensus. Semua anggota komunitas, terutama para tetua dan pemimpin adat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

3. Agama dan Adat

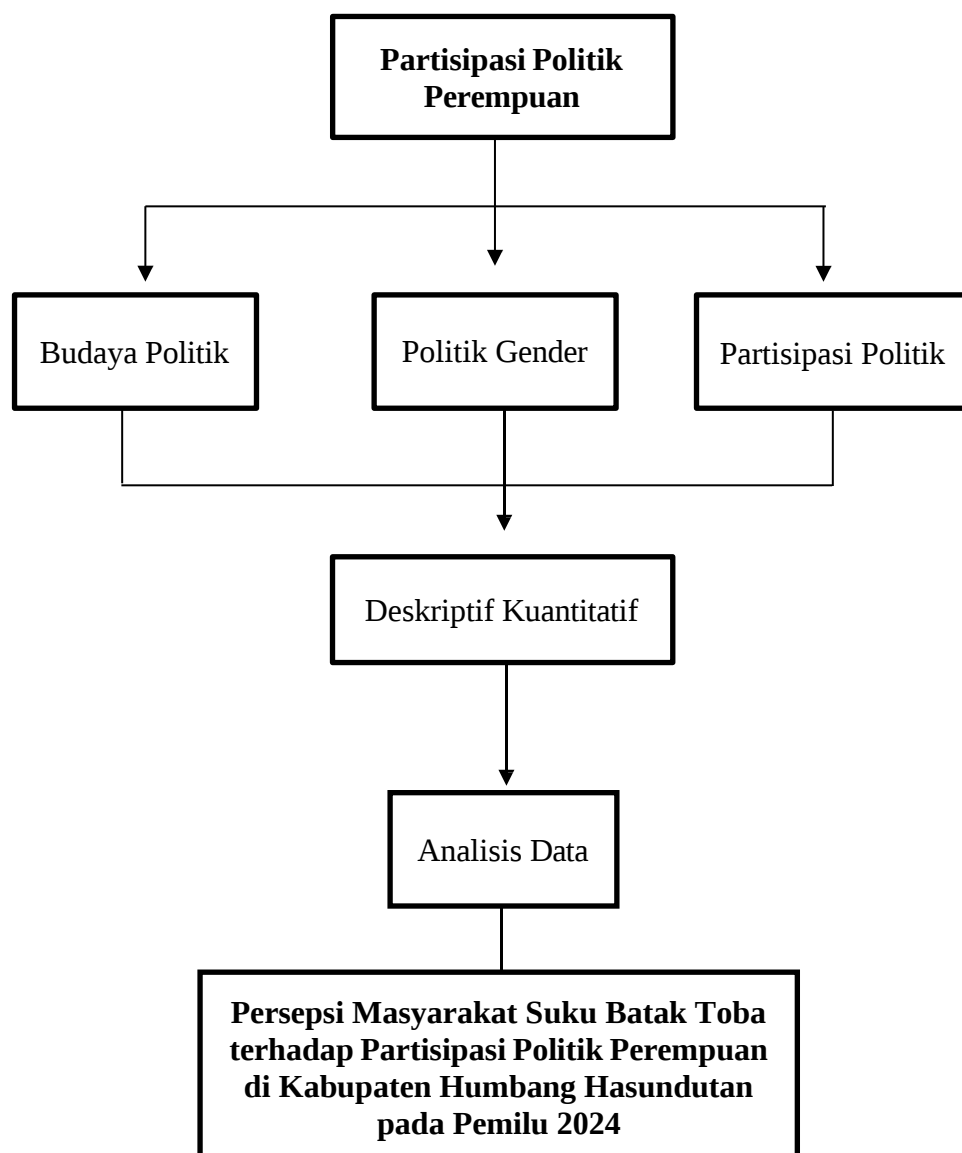
Sinkretisme dimana Agama Kristen yang dianut oleh mayoritas suku Batak Toba sering kali bercampur dengan adat istiadat tradisional. Nilai-nilai agama dan adat berjalan berdampingan dan mempengaruhi pandangan politik dan sosial masyarakat. Upacara adat memainkan peran penting dalam kehidupan politik Batak Toba. Acara-acara seperti pernikahan, kematian, dan pesta adat menjadi momen penting untuk konsolidasi kekuasaan dan pengaruh politik.

4. Modernisasi dan Perubahan Sosial

Pendidikan modern telah membuka jalan bagi lebih banyak anggota masyarakat Batak Toba, termasuk perempuan, untuk terlibat dalam politik. Semakin banyak individu terdidik yang mulai terlibat dalam politik lokal maupun nasional. Urbanisasi dan migrasi ke kota-kota besar juga mempengaruhi dinamika politik suku Batak Toba. Banyak orang Batak Toba yang menetap di perkotaan membawa serta nilai-nilai tradisional mereka, tetapi juga beradaptasi dengan lingkungan politik yang lebih modern.

1.6. KERANGKA BERPIKIR

Setelah peneliti menjelaskan mengenai landasan teori diatas maka peneliti harus membuat kerangka berpikir. Adapun bagan kerangka berpikir yang akan peneliti gambarkan terkait permasalahan di dalam rumusan masalah sebelumnya dengan bentuk seperti di bawah ini:



1.7. HIPOTESIS

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara, kesimpulan sementara atau pendapat yang belum final yang harus dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah karena belum teruji kebenarannya. Namun, bisa jadi apa yang dikemukakan dalam hipotesis adalah dugaan sementara yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar.²¹

1. Fungsi hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan arah dan tujuan bagi penelitian dan membantu peneliti menentukan variabel-variabel yang akan diteliti.
 - b. Untuk menguji teori.
 - c. Menguji kebenaran dan ketidakbenaran suatu pernyataan atau hubungan antar variabel.
 - d. Memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan.

2. Rumus Hipotesis

Atas dasar kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H^1 : Terdapat hubungan antara persepsi masyarakat suku Batak Toba terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada pemilu 2024.

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara persepsi masyarakat suku Batak Toba terhadap partisipasi politik Perempuan di Lembaga

²¹ Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* hlm.130

legislatif Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilu 2024.

Jika terbukti adanya hubungan antara persepsi masyarakat suku Batak Toba terhadap partisipasi politik Perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilu 2024 maka H1 benar dan H0 tidak benar, begitu pun sebaliknya.

1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat sekarang secara sistematis dan faktual. Metode deskriptif adalah metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.²² Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan²³ dan bertujuan untuk menjelaskan persepsi masyarakat suku batak toba terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada Pemilu 2024.

1.8.2. Lokasi Penelitian

²² Nasir dalam Vamela, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik* (2013: 29).

²³ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung

Penelitian ini tepatnya dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

1.8.3. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan masalah dengan menggunakan indikator- indikator agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini.maka peneliti memfokuskan untuk meneliti persepsi masyarakat suku batak toba terhadap partisipasi politik perempuan di Kabupaten Humbang Hasundutan pada pemilu 2024.

1.8.4. Variabel penelitian dan Operasional Variabel

Variabel penelitian menurut Sugiyono adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.²⁴ Definisi operasional variabel merujuk pada proses mengubah konsep abstrak atau teoritis menjadi sesuatu yang dapat diukur atau diamati secara konkret. Dalam penelitian ilmiah, definisi operasional variabel sangat penting karena membantu peneliti dalam mengukur variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian secara objektif dan konsisten.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm.38

Tabel 1.4

Variabel Penelitian

Variabel (X)	Variabel (Y)
Persepsi Masyarakat Suku Batak Toba	Partisipasi Politik Perempuan

1.8.5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif” memberikan pengertian populasi, yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat atau penduduk suku batak toba Kabupaten Humbang Hasundutan yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap untuk pemilu tahun 2024.

Tabel 1.5

Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan DAPIL di Kabupaten Humbang Hasundutan Pemilu 2024

No.	Daerah Pemilihan (DAPIL)	JUMLAH DPT
1.	DAPIL 1	58.882
2.	DAPIL 2	36.133
3.	DAPIL 3	29.342
4.	DAPIL 4	29.989

5.	DAPIL 5	50.031
	TOTAL	204.377

Sumber: KPU Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024 Kabupaten Humbang Hasundutan sebanyak 204.377 pemilih.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.²⁵

Dalam penelitian ini sampelnya adalah seluruh masyarakat yang terdaftar sebagai DPT di 5 DAPIL yang telah disebutkan pada bagian yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Karena jumlah populasi yang akan diteliti berjumlah lebih dari seribu, maka untuk menentukan besaran sampel yang akan diambil peneliti menggunakan teknik *sampel Slovin*.²⁶

$$S = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

S= Jumlah Sampel

N= Jumlah Populasi

e= Tingkat kesalahan

Pada penelitian ini masyarakat yang akan diteliti sebanyak 204.377

²⁵ Sugiyono, *Op.Cit.*, hlm.81.

²⁶ A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*” (Jakarta: Prenada media Group, 2014), hlm. 170.

orang. Peneliti mengambil taraf keyakinan atas keberhasilan penelitian ini adalah 90% dan akan terjadi kesalahan 10%. Maka jumlah sampel menurut

rumus *slovin* adalah:

$$s = \frac{204.377}{1 + 204.377 \times 0,1^2}$$

$$s = \frac{204.377}{1 + 204.377 \times 0,01}$$

$$s = \frac{204.377}{2.045}$$

$s = 99,93$ dibulatkan menjadi 100

Dari rumus tersebut didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang.

c. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Proportional Random Sampling*.

1. Proportional Random Sampling

Dalam menentukan sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada dalam masing-masing kelompok tersebut.²⁷

2. Random Sampling

Teknik ini disebut juga serampangan, tidak panjang bulu atau tidak pilih kasih, objektif, sehingga seluruh elemen populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel penelitian.²⁸

²⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*" (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 82.

²⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, "*Metode Penelitian Sosial*" (Jakarta: PT

Berdasarkan pengertian tersebut teknik *Proportional Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel pada populasi dengan mengambil sampel dari tiap sub populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota dari masing-masing sub populasi secara acak.

Untuk menentukan pembagian sampel di tiap DAPIL peneliti menggunakan rumus **Yamane**:

$$n = \frac{n1 \cdot n}{N}$$

Keterangan :

n1= Jumlah Populasi DPT tiap Kecamatan

n= Jumlah Sampel Pada Populasi Awal

N= Jumlah Populasi (DPT) Keseluruhan

Berdasarkan perhitungan dengan rumus di atas maka dapat ditentukan jumlah sampel untuk tiap DAPIL di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam mendapatkan jumlah sampel, peneliti menggunakan teknik *Proportional Random Sampling*, dimana sampel yang diambil secara acak di masyarakat.

Maka perhitungan untuk jumlah sampel tiap DAPIL di Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut :

a. DAPIL 1 (Doloksanggul dan Sijamapolang)

Jumlah DPT= 58.882 orang

$$n = \frac{58.882 \times 100}{204.377} = 28,81$$

Dibulatkan menjadi 29 sampel

b. DAPIL 2 (Onan Ganjang dan Pakkat)

Jumlah DPT= 36.133 orang

$$n = \frac{36.133 \times 100}{204.377} = 17,67$$

Dibulatkan menjadi 18 sampel

c. DAPIL 3 (Parlilitan dan Tarabintang)

Jumlah DPT= 29.342 orang

$$n = \frac{29.342 \times 100}{204.377} = 14,35$$

Dibulatkan menjadi 14 sampel

d. DAPIL 4 (Pollung dan Baktiraja)

Jumlah DPT= 29.989

$$n = \frac{29.989 \times 100}{204.377} = 14,67$$

Dibulatkan menjadi 15 sampel

e. DAPIL 5 (Paranginan dan Lintong Nihuta)

Jumlah DPT= 50.031

$$n = \frac{50.031 \times 100}{204.377} = 24,47$$

Dibulatkan menjadi 24 sampel

Berdasarkan perhitungan diatas maka dapat diketahui jumlah sampel untuk masing-masing DAPIL, seperti dalam tabel berikut:

Tabel 1.6
Jumlah Sampel Di Tiap Daerah Pemilihan Kabupaten Humbang
Hasundutan pada Pemilu 2024

NO.	NAMA DAPIL	JUMLAH
1.	DAPIL 1 (Doloksanggul dan Sijamapolang)	29
2.	DAPIL 2 (Onan Ganjang dan Pakkat)	18
3.	DAPIL 3 (Parlilitan dan Tatabintang)	14
4.	DAPIL 4 (Pollung dan Baktiraja)	15
5.	DAPIL 5 (Lintong Nihuta dan Paranginan)	24
	TOTAL	100

Sumber: Diolah

1.9. SUMBER DATA

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan dari setting alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen di rumah dengan berbagai responden pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber data.

1.9.1. Data primer

Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Teknik angket merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan maksud menjangkau data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan.

Sasaran angket dalam penelitian ini adalah masyarakat suku batak toba Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdaftar sebagai pemilih tetap.

Dalam penelitian ini digunakan angket karena data yang diperlukan adalah angka-angka yang berupa skor nilai untuk memperoleh data utama dan dianalisis. Setiap tes memiliki tiga alternatif jawaban yaitu (a), (b), (c) yang setiap jawaban diberi nilai bervariasi.

1.9.2. Data sekunder

Data sekunder merupakan jenis sumber data yang bersumber dari media tulis seperti buku, majalah, arsip, jurnal, gambar, dokumentasi yang ada berkaitan dengan aktivitas dan sesuai dengan tema yang dipilih dalam penelitian ini.²⁹

1.10. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1.10.1. Studi Dokumentasi

Dokumenter atau pengumpulan data dari buku-buku referensi, dokumen atau arsip-arsip dan dari peraturan-peraturan atau pasal-pasal dalam undang-undang tentang persepsi masyarakat suku batak toba terhadap partisipasi politik Perempuan.

1.10.2. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Oleh karena itu, dari setiap jawaban pertanyaan terkait persepsi Masyarakat suku batak toba terhadap partisipasi politik Perempuan di

²⁹ *Ibid*, hlm 137

Kabupaten Humbang Hasundutan yang diberikan akan diberikan skor nilai yang berbeda-beda.³⁰

1.11 UJI INSTRUMEN PENELITIAN

1.11.1 Uji Validitas

Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas tinggi.³¹ Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk uji validitas adalah teknik korelasi *product moment* dengan angka dasar menggunakan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = koefisiensi dan korelasi antara variabel x dan y

X = skor dari setiap item

n = jumlah subjek

Y = jumlah dari skor item

Instrumen atau pernyataan dinyatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka instrumen atau item pertanyaan tidak dapat dilakukan pengujian lanjutan atau dihilangkan dalam kebutuhan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan $r_{tabel} = 0,195$ (df= n-2) dengan sig 5%.

1.11.2. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

³⁰ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 142.

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.³² Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item yang valid saja yang masuk pengujian. Untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak, adalah sebagai berikut:

1. Jika angka reliabilitas Cronbach Alpha melebihi angka 0,6 maka instrumen tersebut reliabel, kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan.
2. Jika angka reliabilitas Cronbach Alpha kurang dari angka 0,6 maka instrumen tersebut tidak reliabel, kuesioner tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan.

Uji reabilitas dalam penelitian ini penulis menggunakan *metode Cronbach Alpha* (α) karena penelitian ini menggunakan angket maka rumusnya:

$$r_i \frac{k}{(k-1)} \left\{ 1 - \frac{\sum S_i^2}{S_{t2}} \right\}$$

Keterangan:

r_i = Nilai reabilitas

k = Banyak item pertanyaan

$\sum S_i^2$ = Jumlah skor setiap item

S_{t2} = Jumlah atau total varians

1.12. TEKNIK ANALISIS DATA

Kegiatan dalam analisis data adalah, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.³³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yang mana teknik analisis yang peneliti gunakan disini ialah statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

1.13 TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Untuk mengetahui jawaban dari tiap kuesioner maka dibutuhkan Data Coding untuk menilai tiap jawaban. Data Coding merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data mentah (yang ada dalam kuesioner) ke dalam bentuk yang mudah dibaca oleh mesin pengolah data seperti komputer.³⁴ Dalam penelitian ini penulis mengolah dan menganalisis data menggunakan SPSS.

Oleh karena itu, dari setiap jawaban pertanyaan yang diberikan akan diberi skor nilai yang berbeda-beda.

- | | |
|------------------------|---|
| a. Sangat setuju | 5 |
| b. Setuju | 4 |
| c. Netral | 3 |
| d. Tidak setuju | 2 |
| e. Sangat tidak setuju | 1 |

³³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 147.

³⁴ Prasetyo Bambang, "Metode Penelitian Kuantitatif, Teori dan Aplikasi" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 171.

